

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

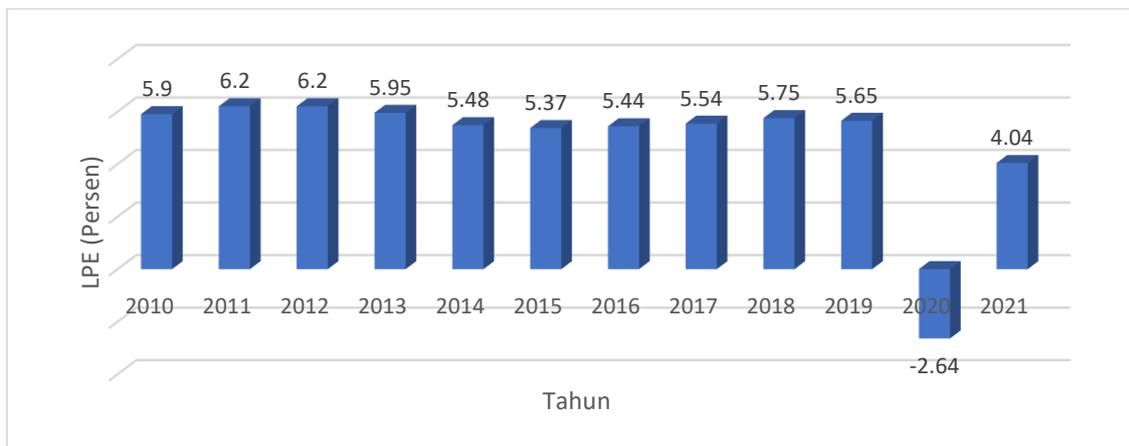
Sebagai bagian dari sebuah pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi daerah juga memiliki peran penting terhadap kesuksesan pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya indikator keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi ini dilihat dari pertumbuhan ekonominya, setiap provinsi di Indonesia khususnya provinsi-provinsi di Pulau Jawa selalu menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai agar lebih baik dari tahun sebelumnya dan perencanaan yang menyangkut perkembangan berdimensi tunggal diukur dengan meningkatnya hasil produksi serta pendapatannya (Hamzah, 2021). Sebuah pendapatan nasional ditunjukkan oleh besarnya nilai produk domestik bruto atau PDB sedangkan besarnya nilai pendapatan suatu wilayah atau daerah ditunjukkan oleh nilai produk domestik regional bruto atau PDRB. Adapun teori baku pertumbuhan ini dikemukakan oleh klasik (Smith, 1776) dan neo klasik (Solow, 1994) bahwa kenaikan pendapatan nasional atau pendapatan perkapita dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkontribusi dan mendorong kenaikan pendapatan diantaranya yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi (Arsyad, 1999).

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial didominasi oleh Pulau Jawa, tercermin dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) Pulau Jawa sebesar 57,89 persen terhadap PDB nasional dan dalam penjelasannya dijelaskan bahwa

ketimpangan struktur perekonomian pulau-pulau di Indonesia masih cukup tinggi, karena Pulau Sumatera tercatat berkontribusi 21,7 persen, Kalimantan 8,25 persen, Sulawesi 6,89 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,78 persen, serta Maluku dan Papua 2,49 persen terhadap pendapatan nasional atau PDB, perbedaan tingkat perekonomian itu disebabkan oleh banyak faktor di antaranya adalah jumlah penduduk dan keberadaan industri seperti yang diketahui bahwa industri manufaktur banyak berlokasi di Pulau Jawa sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar setelah itu penduduk menjadi produktif dan memiliki pendapatan. (Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggungjawab”. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan utama bagi setiap daerah dan digunakan sebagai perangkat data ekonomi untuk mengevaluasi kinerja pembangunan daerah tersebut (BPS, 2022).

Pertumbuhan ekonomi setiap provinsi di Pulau Jawa selama 12 tahun terakhir menunjukkan keadaan perekonomian yang tidak menentu. Berikut ini diilustrasikan pada gambar 1.1 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi setiap provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2021:



**Gambar 1.1 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2021 (Persen)**

*Sumber: Badan Pusat Statistik. Data telah diolah.*

Berdasarkan gambar 1.1 data rata-rata perkembangan laju pertumbuhan ekonomi setiap provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2021 berfluktuatif cenderung naik, kecuali pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi setiap provinsi di Pulau Jawa mengalami penurunan yang cukup signifikan karena terdampak oleh pandemi Coronavirus atau lebih dikenal dengan Covid-19 yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi berupa menurunnya tingkat perekonomian dunia termasuk negara Indonesia (Siti, 2020). Berkurangnya aktivitas masyarakat secara drastis karena pemberlakuan kebijakan pada saat pandemi seperti PSBB baik itu berskala mikro maupun pada zona tertentu, akan sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi (Widiastuti, 2021), sehingga setiap provinsi di Pulau Jawa tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan ekonomi negatif dan terkontraksi -2,64 persen pertumbuhannya menurun jika dibanding tahun 2019 yang pertumbuhannya mencapai 5,65 persen kemudian pada tahun

2021 laju pertumbuhan ekonominya kembali bangkit hingga mencapai 4,09 persen seiring dengan adanya program pemulihan perekonomian yang dilakukan pemerintah.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, jumlah penduduk di Pulau Jawa berkembang dengan pesat, perkembangan jumlah penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara penambahan dan pengurangan jumlah penduduk, hal ini dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir hidup (fertilitas), tetapi secara bersamaan dikurangi oleh jumlah kematian (mortalitas) yang dapat terjadi pada semua golongan umur, dan yang terakhir yaitu mobilitas atau perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya (Rochaida, 2016).

Jumlah penduduk setiap provinsi di Pulau Jawa selama 12 tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah penduduknya selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Berikut ini diilustrasikan pada gambar 1.2 rata-rata perkembangan jumlah penduduk setiap provinsi di Pulau Jawa tahun 2010 sampai 2021:



**Gambar 1.2 Rata-Rata Perkembangan Jumlah Penduduk provinsi-provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2021 (Persen)**

*Sumber: Badan Pusat Statistik. Data telah diolah.*

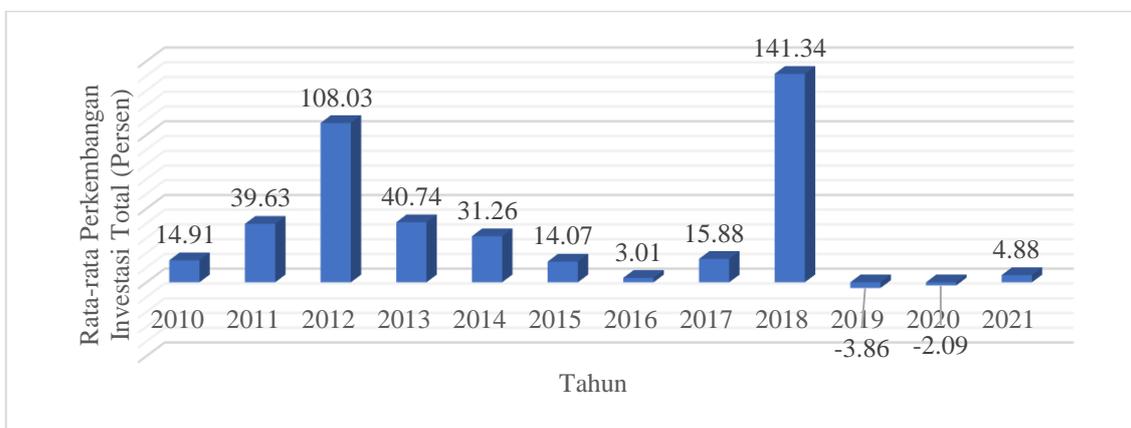
Berdasarkan data pada gambar 1.2 perkembangan jumlah penduduk setiap provinsi Di Pulau Jawa tahun 2010-2021 selalu mengalami kenaikan, dimana kenaikan rata-rata jumlah penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2010 hingga mencapai 2,47 persen dan pada tahun-tahun berikutnya yaitu 2011-2019 rata-rata kenaikan jumlah penduduknya dikisaran 1 persen, sedangkan pada tahun 2020 rata-rata jumlah penduduk tidak mengalami kenaikan justru mengalami penurunan hingga -0,59 persen hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya banyak kematian di beberapa daerah, seiring dengan pandemi Covid-19 yang mulai terkendali pada tahun 2021 perkembangan jumlah penduduk kembali mengalami kenaikan mencapai 0,16 persen.

Jumlah penduduk yang besar di suatu wilayah dapat menjadi dilema, karena memiliki dua sisi yang berbeda pada satu sisi jumlah penduduk yang banyak dapat dijadikan sebagai subjek bagi pembangunan dan menjadikan daerah tersebut pasar yang potensial namun, di sisi lain jumlah penduduk yang besar dapat menjadi beban pembangunan bagi suatu negara berkaitan dengan jumlah pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin lama semakin banyak hal ini seiring dengan perkembangan jumlah penduduknya (Rochaida, 2016), pandangan pesimis ini didukung oleh teori Malthus yang mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk berdasarkan deret ukur sedangkan kebutuhan bahan pangan menurut deret hitung. Pandangan pesimis dalam teori Malthus ini pula menyimpulkan bahwa kesejahteraan tidak akan didapatkan saat pertumbuhan penduduknya tidak dapat dikendalikan dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara dan menjadi sasaran utama pembangunan bagi banyak negara berkembang. Pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk mempercepat pencapaian tingkat kesejahteraan hidup bagi penduduknya dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki setiap wilayah dan usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan adanya investasi atau penanaman modal (Dumairy, 1997).

Investasi adalah penanaman modal yang biasanya dilakukan dalam jangka panjang, untuk pengadaan, pembelian saham-saham dan surat-surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan (OJK). Dalam teori Investasi yang disampaikan oleh Harrod-Domar, dijelaskan bahwa kegiatan investasi merupakan faktor penting dan memiliki dua peran sekaligus untuk membawa pengaruh terhadap perekonomian. Pertama, investasi memiliki hubungan positif dengan pendapatan negara pernyataan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Achadyah Prabawati 2020 karena semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan dan semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh negara. Kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal dan pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan memenuhi permintaan terhadap kebutuhan seluruh masyarakat. Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi mempengaruhi permintaan dan juga penawaran, dalam jangka waktu yang panjang investasi tidak hanya mempengaruhi permintaan agregatif tetapi juga mempengaruhi penawaran agregatif melalui perubahan kapasitas produksinya. (Novita, 2015).

Sumber investasi ini dapat berasal dari individu maupun pemerintah di dalam negeri dan luar negeri atau asing. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, sedangkan penanaman modal asing (PMA) didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah NKRI yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun hasil berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Berikut ini diilustrasikan pada gambar 1.3 rata-rata perkembangan realisasi investasi total PMDN dan PMA provinsi-provinsi di Pulau Jawa selama 12 tahun terakhir yaitu tahun 2010-2021:



**Gambar 1.3 Rata-Rata Perkembangan Investasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2021 (Persen)**

*Sumber: Badan Pusat Statistik. Data telah diolah.*

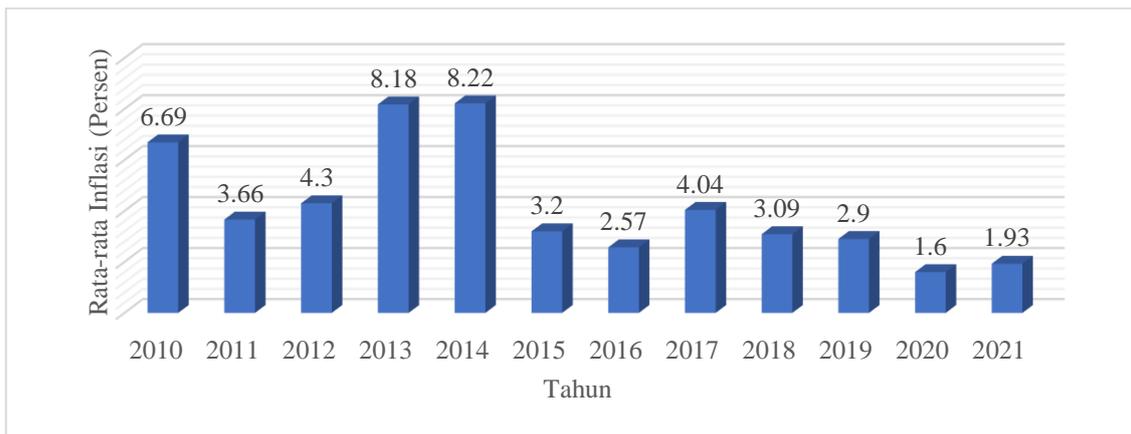
Berdasarkan gambar 1.3 terlihat bahwa rata-rata perkembangan realisasi investasi total penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri provinsi-provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, dimana perkembangan rata-rata realisasi investasi yang paling mencolok terjadi pada tahun 2012 mencapai 103,8 persen dan tahun 2018 mencapai 144,34 persen. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tertinggi di Pulau Jawa selama kurun waktu 12 tahun terakhir, dan yang kedua adalah Jawa Barat yang didukung oleh iklim investasi yang baik, infrastruktur yang mumpuni, produktivitas sumber daya manusia yang tinggi, pangsa pasar besar dan proses perizinan investasi dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 hari (DPMPTSP, 2021), kemudian yang ke tiga provinsi Yogyakarta dengan investasi industri berbasiskan keunggulan lokal yaitu dibidang pariwisata, dan industri kreatif sehingga investasi ini sesuai dengan daya dukung lingkungan dan karakteristik dari masyarakatnya ([jogjainvest.jogjaprov.go.id](http://jogjainvest.jogjaprov.go.id) 2021) Selain itu, provinsi yang ada di Pulau Jawa lainnya yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten juga tetap memiliki daya tarik karena berbagai potensi yang dimiliki setiap daerahnya bagi investor untuk merealisasikan penanaman modalnya (Anggini,2018). Terbukti dengan kontribusi realisasi investasi yang ada di pulau jawa lebih besar dibandingkan dengan realisasi investasi di Pulau Sulawesi dimana hasilnya adalah investasi di Pulau Jawa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonominya sedangkan investasi di Pulau Sulawesi juga tetap berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonominya hal ini dikarenakan realisasi investasinya yang tidak stabil (Jamil, 2020).

Suatu negara dinilai berhasil menyelesaikan permasalahan ekonomi negaranya dapat tercermin dari ekonomi makro negara atau wilayah tersebut, ekonomi makro adalah kajian tentang kegiatan yang membahas ekonomi suatu negara, indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi, perubahan dalam indikator tersebut akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi (Karim, 2007).

Dari sudut pandang ekonomi, inflasi adalah sebuah fenomena moneter dimana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi. Pemeliharaan stabilitas harga merupakan tujuan utama dari kebijakan makro ekonomi untuk sebagian besar negara di dunia. Hal ini dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta penguatan daya beli mata uang (Umaru dan Zubairu, 2012).

Inflasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka terdapat berbagai pandangan mengenai dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. (Philips, 1958) mengemukakan bahwa inflasi yang ringan secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan tingkat pengangguran, pendapat tersebut juga didukung oleh para tokoh perspektif struktural dan keynesian yang percaya bahwa inflasi tidak berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi, namun menurut pandangan monetarist justru inflasi berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan peristiwa pada tahun 1970 dimana negara-negara dengan inflasi yang tinggi terutama negara-negara Amerika Latin mulai mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi dan peristiwa inilah yang menyebabkan munculnya pandangan yang

menyatakan inflasi memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi bukan efek positif. Berikut ini pada gambar 1.4 rata-rata perkembangan inflasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2021:



**Gambar 1.4 Rata- Rata Perkembangan Inflasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2021 (Persen)**

*Sumber: Badan Pusat Statistik. Data telah diolah.*

Berdasarkan gambar 1.4 rata-rata tingkat inflasi setiap Provinsi Di Pulau Jawa tahun 2010 sampai 2021 mengalami fluktuasi hal ini dapat dilihat dari inflasi yang terjadi pada tahun 2010 sebesar 6,69 persen pada tahun berikutnya yaitu tahun 2011 dan 2012 tingkat inflasi cenderung menurun dimana inflasinya hanya sebesar 3,66 dan 4,3 persen namun pada tahun 2013 dan 2014 tingkat inflasi meningkat menjadi 8,18 dan 8,22 persen kemudian tahun 2015-2021 tingkat inflasinya menurun dikisaran 1,6 sampai 4,4 persen jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Bick (2010) dalam *Threshold Effect of Inflation on Economic Growth in Developing Countries*, terjadi hubungan yang signifikan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang masalah tersebut, penelitian tentang **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2021”** penting untuk dilakukan.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi dan selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar kajian dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, investasi, dan inflasi secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2021?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, investasi, dan inflasi secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh jumlah penduduk, investasi, dan inflasi secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2021?
2. Pengaruh jumlah penduduk, investasi, dan inflasi secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2021?

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak yaitu:

### **1. Bagi Pengembangan Ilmu**

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan baru dalam karya ilmiah studi ekonomi pembangunan khususnya tentang jumlah penduduk, investasi, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan menjadi salah satu bahan informasi bagi penelitian selanjutnya.

### **2. Bagi Operasional Kebijakan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan bagi lembaga atau instansi terkait dan dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah pembuatan keputusan atau kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa agar keputusan atau kebijakan yang di ambil tepat dan strategis sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya.

### **3. Bagi Penulis Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti akan memiliki pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih mendalam terutama pada bidang masalah yang berkaitan dengan jumlah penduduk, investasi, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan skala regional/daerah yaitu provinsi-provinsi di Pulau Jawa dengan data-data yang diperoleh dari badan pusat statistik (BPS).

### **1.5.2 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama semester ganjil pada tahun ajaran 2022/2023 serta diperkirakan dimulai sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan 30 April 2023.

